Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Asal-usul Istilah Darussalam dalam Kesultanan Aceh dan Palembang

Zidna Aghnia 'Ilma
UIN Sunan Ampel Surabaya
Penulis Korespondensi: zidna3155@gmail.com
Amiq
UIN Sunan Ampel Surabaya
amiq@uinsa.ac.id
Abdurrahman
Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
abdurrahman.adab01@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas asal-usul istilah Darussalam dalam Kesultanan Aceh dan Kesultanan Palembang. Masalah penelitian ini berangkat dari penggunaan istilah Darussalam yang sama pada kedua kesultanan, meskipun masing-masing memiliki latar belakang politik dan perkembangan Islam yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kemunculan istilah Darussalam dalam sumber-sumber sejarah serta memahami konteks politik dan keagamaan penggunaannya di Aceh dan Palembang. Penelitian menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sejarah dan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber penelitian terdiri atas sumber primer, yaitu Hikayat Aceh, Bustan al-Salatin, dan manuskrip yang berkaitan dengan Kesultanan Palembang, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Tahapan penelitian meliputi heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Aceh, istilah Darussalam berkaitan dengan proses penyatuan wilayah dan perkembangan historiografi Islam di lingkungan istana. Sementara itu, di Palembang, istilah tersebut berkembang seiring pembentukan kesultanan Islam dan dibuktikan melalui manuskrip yang menyebut "Palembang Darussalam". Istilah Darussalam berfungsi sebagai identitas politik Islam, penanda pemerintahan, dan simbol keagamaan dalam kedua kesultanan.

Kata Kunci: *Darussalam; identitas politik Islam; Kesultanan Aceh; Kesultanan Palembang; kesultanan Islam*

PENDAHULUAN

Sejarah Islam di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari perkembangan berbagai kesultanan yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran Islam. Perkembangan kesultanan Islam juga melahirkan penggunaan berbagai istilah yang mencerminkan identitas keislaman dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Salah satu istilah yang menarik untuk dikaji adalah Darussalam, yang digunakan dalam penyebutan beberapa kesultanan di Nusantara, di antaranya Kesultanan Aceh dan Kesultanan Palembang. Kesamaan penggunaan istilah tersebut menunjukkan adanya penggunaan

bahasa dan simbol Islam dalam lingkungan politik kesultanan. Namun, penggunaan istilah yang sama tidak selalu menunjukkan latar belakang sejarah yang sama sehingga perlu dilihat berdasarkan konteks masing-masing wilayah.

Kesultanan Aceh merupakan salah satu kekuatan politik Islam penting di kawasan utara Sumatra. Dalam sumber sejarah seperti Hikayat Aceh, ditemukan penyebutan Aceh sebagai Aceh Dar as-Salam. Sementara itu, Bustan al-Salatin karya Nuruddin al-Raniri juga menjadi sumber penting untuk memahami sejarah pemerintahan dan kehidupan keagamaan Aceh. Kedua sumber tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan politik dan keagamaan kesultanan, meskipun tidak secara sederhana menjelaskan proses awal munculnya istilah Darussalam. Hal tersebut menjadikan asal-usul istilah tersebut sebagai persoalan yang masih perlu ditelusuri melalui sumber-sumber sejarah.

Penggunaan istilah Darussalam juga terdapat dalam Kesultanan Palembang. Perkembangan Palembang sebagai kesultanan berlangsung seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan politik dan keagamaan. Sultan Abdurrahman merupakan salah satu tokoh penting dalam pembentukan Kesultanan Palembang. Dalam perkembangannya, kesultanan ini dikenal dengan nama Kesultanan Palembang Darussalam. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pembentukan pemerintahan kesultanan dengan identitas keislaman. Meskipun demikian, konteks penggunaan Darussalam di Palembang perlu dilihat berdasarkan perkembangan sejarahnya sendiri dan tidak dapat langsung disamakan dengan Aceh.

Penelitian mengenai Kesultanan Aceh dan Palembang telah banyak dilakukan, terutama mengenai sejarah pemerintahan, perkembangan Islam, para sultan, serta kehidupan sosial dan budaya. Namun, kajian yang secara khusus mempertemukan kedua kesultanan melalui persoalan penggunaan istilah Darussalam masih terbatas. Istilah tersebut umumnya hanya ditempatkan sebagai bagian dari nama wilayah atau kesultanan, bukan sebagai persoalan sejarah yang dikaji berdasarkan asal-usul, kemunculan, dan konteks penggunaannya. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menempatkan istilah Darussalam sebagai objek kajian utama dalam sejarah Kesultanan Aceh dan Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sejarah dan jenis penelitian kepustakaan (library research) untuk menelusuri asal-usul serta perkembangan penggunaan istilah Darussalam dalam Kesultanan Aceh dan

Kesultanan Palembang. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Hikayat Aceh, Bustan al-Salatin, serta sumber tertulis yang berkaitan dengan Kesultanan Palembang. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang membahas sejarah Aceh, Palembang, Islam, dan kesultanan di Nusantara. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui perpustakaan, repositori perguruan tinggi, dan koleksi digital yang dapat diakses secara daring.

Proses penelitian dilakukan melalui empat tahapan penelitian sejarah, yaitu heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber yang relevan mengenai penyebutan istilah Darussalam. Selanjutnya, verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber melalui kritik eksternal dan internal. Fakta-fakta yang telah diverifikasi kemudian diinterpretasikan dengan memperhatikan waktu kemunculan istilah, sumber yang menggunakannya, serta konteks politik dan keagamaan di masing-masing kesultanan. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian secara deskriptif-analitis dengan membandingkan penggunaan istilah Darussalam di Aceh dan Palembang untuk melihat persamaan dan perbedaan konteks historisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri asal-usul istilah Darussalam dalam Kesultanan Aceh dan Palembang serta menganalisis makna dan penggunaannya dalam perkembangan politik dan keagamaan kedua kesultanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan istilah dan simbol Islam dalam pembentukan identitas politik kesultanan di Nusantara. Dengan demikian, pembahasan penelitian diarahkan pada asal-usul istilah Darussalam serta makna dan fungsinya dalam Kesultanan Aceh dan Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-Usul Penamaan *Darussalam* di Kesultanan Aceh dan Palembang

1. Asal-Usul Penamaan *Darussalam* di Kesultanan Aceh

Penggunaan istilah Darussalam dalam Kesultanan Aceh tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan kesatuan politik di wilayah Aceh. Sebelum terbentuknya Kesultanan Aceh sebagai sebuah kesatuan politik yang lebih luas, wilayah Aceh terdiri atas beberapa pusat kekuasaan. Dalam tradisi historiografi Aceh, dua wilayah yang sering disebut dalam proses tersebut adalah Mahkota Alam dan Darul Kamal. Kedua wilayah

tersebut pada mulanya merupakan pusat kekuasaan yang berbeda dan memiliki hubungan politik yang tidak selalu harmonis. Proses penyatuan keduanya kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam narasi mengenai terbentuknya Aceh Darussalam.

Keterangan mengenai proses tersebut dapat ditelusuri melalui Hikayat Aceh, salah satu sumber primer penting dalam penelitian mengenai sejarah Kesultanan Aceh. Hikayat Aceh merupakan karya historiografi istana yang memberikan perhatian besar terhadap sejarah kerajaan, terutama pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dalam tradisi teks tersebut, penyatuan wilayah Aceh dikaitkan dengan hubungan antara Mahkota Alam dan Darul Kamal. Tradisi historiografi ini kemudian digunakan oleh sejumlah sejarawan untuk menjelaskan proses terbentuknya Aceh sebagai kesatuan politik.[1]

Menurut keterangan yang terdapat dalam tradisi Hikayat Aceh, Mahkota Alam dan Darul Kamal pada awalnya merupakan dua pusat kekuasaan yang terpisah. Konflik di antara keduanya kemudian berakhir dengan kemenangan pihak Mahkota Alam. Setelah penguasaan tersebut, kedua wilayah berada dalam satu kekuasaan. Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah yang telah disatukan tersebut disebut sebagai Aceh Darussalam. Dengan demikian, dalam historiografi Aceh, kemunculan nama Darussalam dapat ditempatkan setelah berlangsungnya proses penyatuan wilayah politik yang sebelumnya terpisah.[2]

Keterangan tersebut penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa istilah Darussalam tidak semata-mata muncul sebagai nama yang diberikan kepada suatu tempat tanpa konteks politik. Istilah tersebut berkembang bersamaan dengan proses pembentukan kesatuan kekuasaan. Dengan kata lain, perubahan nama dari beberapa pusat kekuasaan menjadi satu kesatuan yang dikenal sebagai Aceh Darussalam memiliki hubungan dengan proses konsolidasi politik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penamaan wilayah dalam kerajaan tradisional juga dapat berfungsi sebagai bagian dari pembentukan identitas politik.

Sumber primer lain yang penting untuk melihat kedudukan istilah tersebut adalah Bustan al-Salatin karya Nuruddin al-Raniri. Karya ini ditulis pada masa Sultan Iskandar Thani dan selesai pada 1638. Dalam Bustan al-Salatin, pembahasan mengenai sejarah

[1] Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 46–47.

[2] Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, 46–47; Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, jil. 1 (Medan: Waspada, 1981), 133–134.

Aceh terdapat dalam Bab II, Fasal 13, dengan judul yang menyebut sejarah raja-raja yang memerintah di negeri Aceh Dar al-Salam.[3] Hal ini memperlihatkan bahwa istilah Dar al-Salam telah digunakan dalam karya historiografi istana untuk menyebut negeri dan pemerintahan Aceh.

Penggunaan istilah Dar al-Salam dalam Bustan al-Salatin memiliki arti penting bagi penelitian ini. Jika Hikayat Aceh memberikan keterangan mengenai proses terbentuknya kesatuan politik Aceh, Bustan al-Salatin menunjukkan bahwa istilah tersebut telah menjadi bagian dari bahasa historiografi kerajaan. Artinya, Darussalam tidak hanya menjadi sebutan yang muncul dalam perkembangan politik, tetapi kemudian memperoleh tempat dalam karya intelektual yang membahas sejarah, pemerintahan, agama, dan kehidupan kerajaan Aceh. Bustan al-Salatin sendiri merupakan karya yang bersifat ensiklopedis karena membicarakan berbagai persoalan keagamaan, moral, sejarah, dan ketatanegaraan.[4]

Hal tersebut memperlihatkan bahwa istilah Darussalam mempunyai hubungan yang kuat dengan perkembangan identitas Islam Kesultanan Aceh. Bahasa Arab yang digunakan dalam istilah Dar al-Salam menunjukkan adanya pengaruh kosakata dan konsep Islam dalam lingkungan politik kerajaan. Penggunaan istilah tersebut juga berlangsung dalam konteks ketika Aceh berkembang menjadi pusat kekuasaan dan intelektual Islam di kawasan Melayu. Pada masa Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani, Aceh menjadi tempat berkembangnya berbagai karya keislaman dan ketatanegaraan. Oleh sebab itu, penggunaan istilah Darussalam dapat dilihat sebagai bagian dari perkembangan identitas politik Islam di Aceh.[5]

Dengan demikian, berdasarkan sumber primer Hikayat Aceh dan Bustan al-Salatin, asal-usul penggunaan istilah Darussalam di Aceh dapat dipahami melalui dua konteks yang saling berhubungan. Pertama, konteks politik berupa proses penyatuan wilayah dan konsolidasi kekuasaan. Kedua, konteks intelektual dan keagamaan berupa berkembangnya tradisi historiografi Islam di lingkungan istana. Kedua konteks tersebut menjadikan Darussalam tidak hanya sebagai nama geografis, tetapi sebagai identitas yang

[3] Nuruddin al-Raniri, *Bustan al-Salatin*, ed. Teuku Iskandar (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), Bab II, Fasal 13.

[4] Nuruddin al-Raniri, *Bustan al-Salatin*, ed. Siti Hawa Haji Salleh (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010), Bab II, Fasal 13.

[5] Jelani Harun, "Kedudukan Istimewa Karya Agung Adab Ketatanegaraan Kesultanan Aceh Darussalam dalam Sejarah Persuratan Melayu," *Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu* (2017).

melekat pada kesultanan.

Namun demikian, perlu dibedakan antara asal-usul terbentuknya Kesultanan Aceh dengan asal-usul penggunaan kata Darussalam. Sumber-sumber sejarah tidak selalu memberikan informasi yang secara eksplisit menunjukkan siapa orang pertama yang menciptakan atau menetapkan nama tersebut. Karena itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa satu tokoh tertentu merupakan pencipta istilah Darussalam. Yang dapat ditunjukkan berdasarkan sumber adalah bahwa istilah tersebut muncul dan berkembang dalam proses konsolidasi politik Aceh dan kemudian digunakan secara konsisten dalam tradisi historiografi kesultanan.

2. Asal-Usul Penamaan *Darussalam* di Kesultanan Palembang

Perkembangan istilah *Darussalam* di Palembang memiliki konteks historis yang berbeda dengan Aceh. Penggunaan nama tersebut berkaitan dengan perkembangan Palembang menjadi kesultanan Islam dan terbentuknya pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Palembang Darussalam. Proses tersebut berlangsung dalam konteks perubahan politik Palembang, hubungan dengan kekuatan politik lain di Nusantara, serta semakin kuatnya pengaruh Islam dalam pemerintahan.

Dalam historiografi Palembang, Sultan Abdurrahman atau Kemas Hindi merupakan tokoh penting dalam pembentukan Kesultanan Palembang Darussalam. Sejumlah kajian sejarah menyebut bahwa pada masa Sultan Abdurrahman, Palembang berkembang menjadi pemerintahan kesultanan yang lebih mandiri. Pemerintahannya juga menjadi tahap penting dalam pembentukan struktur politik Islam Palembang.[6]

Sumber mengenai sejarah Kesultanan Palembang menunjukkan bahwa perkembangan pemerintahan tersebut berjalan bersamaan dengan pembangunan berbagai institusi keagamaan dan politik. Sultan Abdurrahman berperan dalam pembangunan keraton dan masjid serta dalam penguatan kedudukan Islam dalam pemerintahan. Dengan demikian, munculnya identitas Palembang Darussalam tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan pemerintahan kesultanan yang menjadikan Islam sebagai salah satu dasar penting kehidupan politik.[7]

[6] Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya* (Jember: Jember University Press, 2016), 27–34.

[7] Ade Tunggal Bahial Halim, Mohammad Syawaluddin, dan Padila, "*Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam: Perannya terhadap Kesultanan Palembang Darussalam*," *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* 4, no. 2 (2024).

Berbeda dengan Aceh yang memiliki *Hikayat Aceh* dan *Bustan al-Salatin* sebagai sumber historiografi istana yang relatif jelas, bukti penggunaan istilah *Darussalam* dalam konteks Palembang juga dapat ditelusuri melalui manuskrip yang berasal dari lingkungan kesultanan. Salah satu bukti penting terdapat dalam manuskrip PNRI A 161. Pada bagian awal naskah tersebut terdapat catatan kepemilikan yang menyebut Sultan Mahmud Badaruddin dan silsilah penguasa sebelumnya yang memerintah "dalam negeri Palembang Darussalam". Catatan tersebut menunjukkan bahwa istilah *Palembang Darussalam* digunakan dalam lingkungan penulisan dan kepemilikan naskah kesultanan.[8]

Bukti lain dapat ditemukan dalam manuskrip KBG 185. Manuskrip tersebut memuat catatan yang menyebut alamat Pangeran Adi Menggala, putra Sultan Muhammad Bahauddin, dengan frasa "fi balad Palembang Darussalam". Manuskrip tersebut disalin pada 1801 atas perintah Pangeran Adi Menggala.[9] Bukti ini memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa penggunaan *Palembang Darussalam* tidak hanya muncul dalam karya penelitian modern, tetapi juga terdapat dalam dokumen atau manuskrip yang berasal dari lingkungan masyarakat istana Palembang.

Dengan demikian, manuskrip-manuskrip Palembang memberikan bukti bahwa istilah *Darussalam* telah digunakan sebagai bagian dari penyebutan wilayah pemerintahan. Penggunaan istilah tersebut dalam catatan kepemilikan naskah menunjukkan bahwa *Palembang Darussalam* telah menjadi identitas politik yang dikenali dalam lingkungan kesultanan. Istilah tersebut juga menunjukkan adanya hubungan antara tradisi tulis, lingkungan istana, dan identitas politik Palembang.

Perkembangan tersebut semakin jelas jika dikaitkan dengan tradisi intelektual Kesultanan Palembang. Penelitian mengenai perpustakaan Kesultanan Palembang menunjukkan bahwa lingkungan istana merupakan salah satu pusat pengumpulan, penyalinan, penyimpanan, dan penulisan manuskrip. Kesultanan Palembang berkembang sebagai pusat kajian dan sastra Islam, sehingga tradisi tulis memiliki hubungan erat dengan perkembangan identitas Islam kesultanan.[10] Dengan demikian, penggunaan

[8] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Manuskrip A 161, *Idrāk al-Ḥaqīqah fī Takhrīj Aḥādith al-Ṭarīqah*, fol. 1r.

[9] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Manuskrip KBG 185, catatan alamat Pangeran Adi Menggala, fol.

[10] Yusni Febriani, Endang Rochmiatun, dan Nyimas Umi Kalsum, "*Sejarah Perpustakaan Islam di Palembang: Telaah pada Perpustakaan Kesultanan Palembang*," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 21, no. 2 (2021).

istilah *Darussalam* dalam manuskrip tidak dapat dipandang sebagai kebetulan linguistik semata, tetapi merupakan bagian dari budaya tulis dan identitas politik kesultanan.

Berdasarkan uraian tersebut, asal-usul penamaan *Darussalam* di Palembang dapat dipahami dalam konteks pembentukan kesultanan Islam dan perkembangan tradisi politik serta intelektual Palembang. Jika di Aceh istilah *Darussalam* dapat ditelusuri melalui narasi penyatuan wilayah dalam *Hikayat Aceh* dan penggunaannya dalam *Bustan al-Salatin*, maka di Palembang bukti penggunaannya dapat diperkuat melalui manuskrip-manuskrip yang secara langsung menyebut "Palembang Darussalam". Perbedaan jenis sumber tersebut menunjukkan bahwa penelitian terhadap istilah *Darussalam* perlu memperhatikan karakter sumber sejarah yang tersedia pada masing-masing wilayah.

Makna dan Fungsi Penamaan *Darussalam* di Kesultanan Aceh dan Palembang

Secara etimologis, istilah *Darussalam* berasal dari bahasa Arab *dār al-salām*. Kata *dār* berarti tempat atau negeri, sedangkan *al-salām* berkaitan dengan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam konteks penelitian ini, makna tersebut tidak hanya dipahami secara kebahasaan, tetapi juga dilihat berdasarkan fungsi istilah tersebut dalam kehidupan politik kesultanan. Penggunaan istilah Arab dalam nama kesultanan menunjukkan adanya hubungan antara identitas pemerintahan dengan perkembangan Islam. Dalam sejarah politik Islam, penggunaan bahasa dan istilah keagamaan dalam nama wilayah atau pemerintahan dapat menjadi bagian dari pembentukan identitas politik. Oleh karena itu, *Darussalam* dalam konteks Aceh dan Palembang dapat dipahami sebagai istilah yang memiliki makna simbolik sekaligus politik.

Di Kesultanan Aceh, fungsi *Darussalam* pertama-tama dapat dilihat sebagai penanda identitas politik Islam. Istilah tersebut membedakan pemerintahan Aceh dari pusat-pusat kekuasaan lainnya dan menunjukkan karakter Aceh sebagai kesultanan Islam. Penggunaan istilah *Dar al-Salam* dalam *Bustan al-Salatin* memperkuat hal tersebut karena istilah tersebut muncul dalam karya yang membicarakan sejarah para raja dan pemerintahan Aceh.[11]

Fungsi kedua adalah sebagai penanda kesatuan politik. Sebagaimana dijelaskan dalam tradisi *Hikayat Aceh*, penyebutan Aceh Darussalam berkaitan dengan proses penyatuan wilayah Mahkota Alam dan Darul Kamal. Dengan demikian, nama tersebut

[11] Nuruddin al-Raniri, *Bustan al-Salatin*, Bab II, Fasal 13.

dapat dibaca sebagai identitas dari suatu kesatuan politik yang lebih luas. Penyebutan tersebut tidak lagi menunjuk pada satu pusat kekuasaan yang terpisah, melainkan pada wilayah yang telah berada dalam satu pemerintahan.[12]

Fungsi ketiga adalah penguatan legitimasi pemerintahan Islam. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya karya-karya ketatanegaraan dan keagamaan di Aceh. *Bustan al-Salatin* misalnya, tidak hanya membicarakan sejarah raja-raja, tetapi juga mengandung pembahasan mengenai agama, moral, dan pemerintahan.[13] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa identitas kerajaan dan identitas Islam berada dalam hubungan yang erat.

Dalam konteks Palembang, istilah *Darussalam* juga memiliki fungsi sebagai penanda identitas kesultanan Islam. Penggunaan istilah tersebut dalam manuskrip yang berasal dari lingkungan kesultanan menunjukkan bahwa nama Palembang Darussalam telah digunakan untuk menunjuk wilayah pemerintahan. Catatan dalam manuskrip PNRI A 161, misalnya, secara eksplisit menyebut penguasa yang memerintah "negeri Palembang Darussalam".[14] Fungsi berikutnya adalah memberikan identitas politik terhadap pemerintahan Palembang yang telah berkembang sebagai kesultanan. Nama tersebut membedakan pemerintahan kesultanan dari bentuk-bentuk pemerintahan Palembang pada masa sebelumnya. Penggunaan istilah *Darussalam* sekaligus memperlihatkan bahwa Islam telah menjadi unsur penting dalam pembentukan identitas politik kesultanan.

Selain itu, *Darussalam* juga mempunyai fungsi sebagai simbol cita-cita pemerintahan. Makna "negeri keselamatan" atau "negeri kedamaian" dapat dipahami sebagai konsep ideal yang melekat pada nama pemerintahan. Akan tetapi, makna tersebut tidak berarti bahwa kondisi politik dan sosial kesultanan selalu berada dalam keadaan damai. Dalam penelitian sejarah, makna simbolik nama perlu dibedakan dari kondisi empiris masyarakat. Karena itu, *Darussalam* lebih tepat dipahami sebagai konsep atau identitas ideal yang ingin ditampilkan oleh sebuah pemerintahan.

Fungsi tersebut dapat dilihat dalam perkembangan Palembang sebagai pusat kehidupan Islam. Lingkungan kesultanan menghasilkan dan menyimpan berbagai manuskrip keagamaan serta karya intelektual. Penelitian mengenai perpustakaan

[12] *Hikayat Aceh*; lihat juga Lombard, *Kerajaan Aceh*, 46–47.
[13] Al-Raniri, *Bustan al-Salatin*, Bab II, Fasal 13.
[14] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Manuskrip A 161, *Idrāk al-Ḥaqīqah fī Takhrīj Aḥādith al-Ṭarīqah*, fol. 1r.

Kesultanan Palembang menunjukkan bahwa istana memiliki fungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyalinan manuskrip, sekaligus menjadi pusat intelektual Islam.[15] Kondisi ini memperkuat pemahaman bahwa identitas *Darussalam* tidak berhenti pada nama administratif, tetapi berkaitan dengan perkembangan kebudayaan Islam di lingkungan kesultanan.

Jika dibandingkan, terdapat beberapa persamaan dalam fungsi *Darussalam* di Aceh dan Palembang. Pertama, istilah tersebut berfungsi sebagai identitas politik Islam. Kedua, istilah tersebut menjadi bagian dari legitimasi dan representasi pemerintahan kesultanan. Ketiga, istilah tersebut mengandung makna simbolik mengenai negeri yang aman, tenteram, dan berada dalam tatanan yang sesuai dengan nilai Islam.

Akan tetapi, terdapat perbedaan konteks dalam penggunaannya. Di Aceh, *Darussalam* berkaitan erat dengan proses penyatuan pusat-pusat kekuasaan dan perkembangan tradisi historiografi kerajaan. *Hikayat Aceh* memberikan narasi mengenai proses penyatuan tersebut, sedangkan *Bustan al-Salatin* menunjukkan penggunaan istilah *Dar al-Salam* dalam historiografi istana. Sementara itu, di Palembang, penggunaan *Darussalam* lebih jelas terlihat sebagai identitas pemerintahan kesultanan yang dibuktikan antara lain melalui manuskrip yang menyebut "Palembang Darussalam".[16]

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kesamaan penggunaan istilah *Darussalam* tidak berarti bahwa kedua kesultanan memiliki proses sejarah yang identik. Istilah yang sama dapat muncul dalam konteks politik yang berbeda. Di Aceh, *Darussalam* berkembang bersama proses konsolidasi politik dan tradisi historiografi Islam yang kuat. Di Palembang, istilah tersebut berkembang bersama pembentukan kesultanan Islam dan tradisi manuskrip istana yang kemudian menjadi salah satu sarana untuk mempertahankan identitas politik dan keagamaan.

Dengan demikian, *Darussalam* dapat dipahami sebagai istilah yang memiliki tiga lapisan makna. Pertama, makna geografis, yaitu sebagai penanda wilayah kekuasaan. Kedua, makna politik, yaitu sebagai identitas pemerintahan kesultanan. Ketiga, makna simbolik-keagamaan, yaitu sebagai representasi negeri yang diidealkan berdasarkan nilai keselamatan, kedamaian, dan Islam. Ketiga lapisan tersebut muncul dalam konteks yang berbeda pada Aceh dan Palembang, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa penamaan

[15] Febriani, Rochmiatun, dan Kalsum, "*Sejarah Perpustakaan Islam di Palembang*."

[16] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Manuskrip A 161, *Idrāk al-Ḥaqīqah fī Takhrīj Aḥādith al-Ṭarīqah*, fol. 1r; Manuskrip KBG 185, fol.

wilayah pada masa kesultanan tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan identitas politik Islam di Nusantara.

Dengan demikian, berdasarkan sumber primer dan sekunder yang digunakan, istilah *Darussalam* dalam Kesultanan Aceh dan Palembang tidak sekadar merupakan persamaan nama. Istilah tersebut merupakan bagian dari proses sejarah yang berkaitan dengan pembentukan kesatuan politik, perkembangan Islam, legitimasi kekuasaan, dan pembentukan identitas kesultanan. Perbedaan konteks penggunaannya justru menunjukkan bahwa istilah politik-keagamaan yang sama dapat memperoleh fungsi dan arti yang berbeda sesuai dengan perkembangan sejarah masing-masing kesultanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa istilah Darussalam dalam Kesultanan Aceh dan Palembang berkembang dalam konteks sejarah politik dan keislaman yang berbeda. Di Aceh, penggunaan istilah Darussalam berkaitan dengan proses penyatuan wilayah dan konsolidasi kekuasaan yang dalam tradisi *Hikayat Aceh* dikaitkan dengan Mahkota Alam dan Darul Kamal, sedangkan penggunaannya dalam *Bustan al-Salatin* menunjukkan bahwa istilah *Dar al-Salam* telah menjadi bagian dari historiografi dan identitas pemerintahan Aceh. Di Palembang, istilah Darussalam berkembang seiring dengan pembentukan kesultanan Islam dan dapat ditemukan dalam manuskrip yang menyebut "Palembang Darussalam" sebagai identitas wilayah pemerintahan. Dalam penggunaannya, Darussalam tidak hanya berfungsi sebagai penamaan wilayah, tetapi juga sebagai identitas politik Islam, penanda pemerintahan, serta simbol keagamaan yang mengandung gagasan mengenai keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Meskipun memiliki fungsi yang serupa, konteks penggunaannya berbeda, yakni di Aceh lebih berkaitan dengan konsolidasi politik dan perkembangan historiografi istana, sedangkan di Palembang berkaitan dengan pembentukan kesultanan Islam dan tradisi manuskrip istana. Dengan demikian, penggunaan istilah Darussalam pada kedua kesultanan menunjukkan bahwa penamaan wilayah pada masa kesultanan memiliki hubungan erat dengan pembentukan identitas politik dan keislaman masing-masing pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Febriani, Yusni, Endang Rochmiatun, dan Nyimas Umi Kalsum. "Sejarah Perpustakaan Islam di Palembang: Telaah pada Perpustakaan Kesultanan Palembang." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 21, no. 2, 2021.

Halim, Ade Tunggal Bahial, Mohammad Syawaluddin, dan Padila. "Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam: Perannya terhadap Kesultanan Palembang Darussalam." *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* 4, no. 2, 2024.

Harun, Jelani. "Kedudukan Istimewa Karya Agung Adab Ketatanegaraan Kesultanan Aceh Darussalam dalam Sejarah Persuratan Melayu." *Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu*, 2017.

Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636).* Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya.* Jember: Jember University Press, 2016.

Nuruddin al-Raniri. *Bustan al-Salatin.* Diedit oleh Teuku Iskandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966.

Nuruddin al-Raniri. *Bustan al-Salatin.* Diedit oleh Siti Hawa Haji Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Idrāk al-Ḥaqīqah fī Takhrīj Aḥādith al-Ṭarīqah.* Manuskrip A 161.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Manuskrip KBG 185.

Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad.* Jilid 1. Medan: Waspada, 1981.

Hikayat Aceh.